

# ANALISA TENTANG UNJUK RASA ANGGOTA POLRES KUDUS

Oleh :

Kop. Pol. Drs. Anwari Hilmy, Kol. Pol. Drs. M. Djunaeni dan  
Let. Kol. Pol. Drs. H.D. Brototanoyo

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

a. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Kudus pada tanggal 1 Juli 1999, saat seluruh anggota kepolisian di Indonesia memperingati hari Bhayangkara ke-35 meyakinkan kita begitu besarnya pengaruh reformasi terhadap tatanan kehidupan bangsa termasuk satuan kepolisian di Kudus.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang sarat dengan ketentuan disiplin dan tatanan idealisme moral serta perilaku Pribadi maupun kesatuan, sulit menerima kenyataan semacam ini. Ditambah salah satu tugas pokoknya dibidang penegak hukum dan pelayanan masyarakat pada masa reformasi adalah "Pengaman Giat Massal" yang diatur dengan UU No. 24/1999 tentang penyampaian pendapat umum.

c. Dibalik kejadian yang menghentikan para anggota Polri terutama para Pimpinan, masyarakat umum, para pakar pengamat sosial politik, hukum, Kepolisian dan para anggota legislatif maupun Law Enforcement Society saling mengajukan pendapat tentang fenomena "unjuk rasa dilingkungan Polri", yang umumnya sangat menyesali terjadinya unjuk rasa oleh para hamba hukum, namun dilakukan tidak berdasarkan hukum.

d. Kejadian terhadap "Kasus Kudus" perlu dilakukan guna melihat sejauh mana kemungkinan dan pola yang ditimbulkan bagi organisasi, serta tindakan

**Anggota Sat Sabhara Polres Kudus melaksanakan Dinas Jaga di Kediaman Kapolres mulai pukul 20.00 s/d 06.00 Wib, karena Kapolres memelihara Rusa, ada anggota yang beranggapan bahwa jaga di kediaman Kapolres dianggap menjaga Rusa.**

yang harus diambil guna mencegah tidak terulang kembali. "Kasus Kudus" yang memberikan gambaran "Menepuk Air di dulang terpercik muka sendiri".

## II. DATA DAN FAKTA YANG DIDAPAT

### 2. Latar Belakang.

a. Letkol. Pol. Drs. BAMBANG PURNOMOSIDI, berdasarkan Sprin Kapolda Jateng pada akhir bulan April ditetapkan sebagai Kapolres Kudus, setelah dinilai tugasnya berhasil sebagai Kapolres Temanggung selama 8 bulan.

b. Jabatan Kapolres Kudus diemban akhir bulan April atau menjelang dilaksanakannya Pemilu bulan Juni 1999 ternyata memerlukan Kepemimpinan yang mampu menyiapkan kondisi Kesatuan dalam rangka siap operasional, dengan mengedepankan disiplin perorangan dan disiplin kesatuan.

### 3. Kondisi Satuan sebelum Unjuk Rasa.

a. Kebijakan dan perintah :

1) Sekitar awal Bulan Mei 1999, diberlakukan Siaga I bagi seluruh jajaran Polres Kudus mulai jam 07.00 WIB dalam rangka mengantisipasi dan kesiapan satuan menghadapi

Sosialisasi Partai-Partai baru, Harlah Partai, Deklarasi Partai-partai politik dan kegiatan masyarakat lainnya, namun tidak diberikan dukungan makan.

2) Dalam rangka kegiatan kampanye pemilu 1999, seluruh anggota Polres hingga Polsek Kudus telah diberlakukan Siaga I, pada putaran ke III dari tanggal 31 Mei s/d 4 Juni 1999, diberikan jatah makan sehingga anggota mengeluh.

3) Perintah Kapolres tentang pelaksanaan Apel Pagi pada pukul 06.00 WIB kemudian di lanjutkan tugas pengaturan lalu-lintas, hal ini menurut anggota dianggap memberatkan dan terlalu berlebihan, walaupun perintah tersebut merupakan jabaran dari bijak Kapolda.

b. Kegiatan Satuan yang diduga menimbulkan Unjuk Rasa anggota.

1) Anggota Sat Sabhara Polres Kudus melaksanakan Dinas Jaga di Kediaman Kapolres mulai pukul 20.00 s/d 06.00 WIB, karena Kapolres memelihara Rusa, ada anggota yang beranggapan bahwa Dinas Jaga di kediaman Kapolres dianggap menjaga Rusa.

2) Kapolres telah menjatuhkan hukuman kepada 20 orang anggotanya yang telah me-

...lakukan kesalahan/pelanggaran tanpa adanya pentahapan/pengawasan (peringatan, teguran, tindakan mendakan awal lainnya), namun langsung tindakan phisik/administrasi.

#### 4. Saat Kejadian Unjuk Rasa

a. Pada tanggal 1 Juli 1999 jam 09.00 WIB setelah upacara hari Bhayangkara di halaman Mapolres Kudus, para tamu undangan dan Muspida dipersilahkan menuju ke Aula Mapolres untuk mengikuti acara Tasyakuran. Begitu pula untuk para anggota Polri dan PNS telah dihimbau untuk mengikutinya, namun anggota Polri dan PNS tidak mau termasuk perwira lainnya. Selanjutnya mereka (pada anggota Polri dan PNS) melakukan aksi duduk-duduk dihalaman Mapolres Kudus dan mengadakan orasi serta unjuk rasa yang diikuti oleh 1 (satu) orang Pamen, 1 orang Pama dan 193 orang (Badan Ta). Adapun orasi dan unjuk rasa tersebut dalam bentuk :

- 1) Peragaan/orasi serah terima Jabatan Kapolres
- 2) Peragaan anggota yang terkena tindakan disiplin dari Kapolres hingga pura-pura pingsan dilakukan oleh Kopka C. Edy Biyakto Nrp. 55040216.
- 3) Peragaan selamatn agar Kapolres segera pindah oleh Serda DJIMIN S. Nrp. 58060477 selaku pemimpin do'a dan

diikuti anggota yang lain.

4) Anggota-anggota Sat Sabhara dengan kata-kata dan ungkapan-ungkapan vokal selama berlangsungnya unjuk rasa, karena pada saat meninggalkan tempat akan diteriaki HUU..... oleh anggota UPS.

5) Anggota Bintara dan Tamtama yang tergabung dalam unjuk rasa tetapi tidak mau meninggalkan tempat (pasip).

b. Pada saat kejadian unjuk rasa tersebut Wakapolwil Pati atas perintah Kapolwil datang ke Polres Kudus untuk menangani kasus tersebut. Pada saat itu Wakapolwil telah membujuk anggota untuk pindah tempat dari depan ke halaman belakang dengan maksud agar tidak dilihat orang luar.

Akhirnya anggota pindah tempat kebelakang dan melakukan dialog dengan Wakapolwil, selanjutnya anggota masuk ketempat masing-masing.

#### 5. Setelah Kejadian Unjuk Rasa.

a. Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 1999 Pukul 20.00 s/d 21.00 WIB di Aula Mapolres Kudus Kapolwil PATI Kol. Pol. Drs. DJUMAIN ARIEF telah memberikan pengarahn berkaitan dengan masalah unjuk rasa kepada seluruh anggota Polres Kudus. Dalam pengarahn tersebut Kapolwil PATI didampingi Wakapolwil. Kabag

Serse Polwil, Kabag IPP Polwil dan Wakapolres.

- b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 1999 pukul 13.00 s/d 14.00 WIB di Aula Mapolres Kudus dilakukan pengarahan oleh Iripolda Jateng Kol Pol Drs. SLAMET HARYONO yang diikuti oleh para Kasat Fung, Kapolsek dan seluruh anggota Polres serta anggota yang mendapatkan tindakan Skumlin (Surat Keputusan Hukuman Disiplin) Kapolres Kudus.
- c. Kegiatan di Polres Kudus baik operasional maupun pembinaan tetap berjalan seperti biasa.
- d. Anggota Intelpampol terus melakukan pemantauan dan memonitoring perkembangan setelah aksi unjuk rasa.
- e. Hasil angket para anggota Polres Kudus (Polri dan PNS) sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang antara lain :
- 1) Faktor Penyebab Adanya Unjuk Rasa
    - a) Spontanitas 21 orang
    - b) Sejalan dengan reformasi 1 orang
    - c) Penerapan disiplin kaku / sewenang-wenang 3 orang
    - d) Komunikasi antara pimpinan dan bawahan tersumbat 9 orang
    - e) Anggota kurang menguasai

dan kurang mendalami tugasnya dan aturan hukum yang berlaku 2 orang

- f) Sangsi ancaman tidak sesuai dengan perbuatan 2 (dua) orang.
- g) Anggota merasa tertekan selama pemilu 1 orang
- h) Rasa senasib sepenanggungan 2 orang
- i) Tidak profesional 2 orang
- j) Rasa curiga dan membandingkan dengan Kapolres/ Pimpinan terdahulu 4 orang
- k) Adanya suara-suara sumbang Kepemimpinan Kapolres pada Kesatuan (Sebelum Menjabat Kapolres Kudus)
  - l) Kata-kata kasar Kapolres (tertindas) 1 orang
  - m) Anggota tidak mendapat jatah makan 1 orang
  - n) Ulah segelincir orang 1 orang
  - o) Anggota frustrasi/jenuh 1 orang
  - p) Tidak ikut unjuk rasa 26 orang
  - q) Kurang puas Kepemimpinan Kapolres 15 orang.

---

**Seharusnya anggota mempunyai kesadaran yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai pengaman, pelindung, pembimbing dan penganyom masyarakat.**

---

2) Bagaimana saran dan pendapat cara pemecahan agar tidak terjadi unjuk rasa lagi:

- a) Tingkatkan disiplin dan semangat kerja 34 orang.
- b) Patuh dan taat kepada pimpinan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku 20 orang.
- c) Pengarahan dan pembinaan kedalam oleh pimpinan 30 orang.
- d) Mohon dihentikan mutasi anggota karena tidak tahu masalahnya 5 orang.
- e) Agar dipupuk hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan 11 orang.
- f) Tingkatkan Yanmas Polri 9 orang.
- g) Agar samsi hukuman sesuai dengan perbuatannya 2 orang.
- h) Anggota yang tidak bersalah dan tidak ikut unjuk rasa juga ditindak 1 orang.
- i) Massa anggota yang terlibat Unjuk Rasa.

### III. KAJIAN DAN ANALISA

#### 6. Pra Pemilu 1999.

a. Dua bulan menjelang Pemilu 1999 Letkol. Pol. Drs. BAMBANG PURNOMOSIDI dikukuhkan sebagai Kapolres Kudus dan pada awal minggu diberlakukan Siaga I dalam

rangka Sosialisasi Partai Politik Baru, Harlah Partai-Politik, Deklarasi Partai-Politik serta kegiatan masyarakat lainnya. Pada dasarnya adalah untuk kesiapan kesatuan menghadapi kegiatan tersebut, tetapi hal tersebut ditanggapi negatif oleh para anggota khususnya UPS (Unit Perintis Sabhara) dan dianggap berlebihan disamping tidak ada dukungan makan dan dukungan operasional lainnya. Memang kegiatan tersebut ada kaitan dan hubungannya dengan kegiatan pemilu, tetapi tidak ada dukungan makan dan operasional lainnya.

Seharusnya setiap anggota Polri khususnya Polres Kudus menyadari bahwa "bilamana mendapatkan tugas melebihi jam kerja, pada dasarnya uang makan dan lain sebagainya telah diberikan dalam bentuk uang lauk pauk (ULP)". Dan yang mendapatkan ULP hanyalah anggota Polri aktif tidak termasuk PNS. Karena bilamana PNS bekerja melebihi jam dinas maka yang bersangkutan akan mendapatkan uang lembur. Dengan demikian bilamana ada anggota Polri yang bekerja melebihi jam kerja maka tidak punya hak menuntut uang makan.

Sedangkan apabila setiap anggota Polri khususnya Polres Kudus menyadari hal tersebut

maka "Kasus unjuk Rasa" anggota Polres Kudus tidak boleh terjadi karena semua hak-hak prajurit/anggota telah diterimakan. Tuntutan dukungan makan adalah sesuai yang dicari-cari dan tidak ada tempatnya sebagai seorang anggota Polisi apalagi sampai menilai Kapolres sebagai pimpinannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan falsafah hidup Polri Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya.

b. Dalam rangka kegiatan pemilu (Operasi Mantap Brata), mulai dari kegiatan kampanye sampai pelaksanaan pemilu seluruh anggota Polres hingga Polsek jajaran Polres Kudus telah dilakukan siaga I. Namun ternyata banyak anggota yang mengeluh karena tidak diberi uang makan dan baru pada putaran ke III dari tanggal 31 Mei 1999 s/d 4 Juni 1999 diberikan jatah makan. Hasil pengecekan dokumen diurus bayar Polres Kudus, dukungan makan/operasional Operasi

---

**Tuntutan dukungan makan adalah sesuatu yang dicari-cari dan tidak pada tempatnya sebagai seorang anggota Polisi apalagi sampai menilai Kapolres sebagai pimpinannya.**

---

Mantap Brata mulai tanggal 31 Mei 1999 s/d 4 Juni 1999 telah diberikan. Seharusnya anggota mempunyai kesadaran yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai pengaman, pelindung, pembimbing dan penganyom masyarakat.

c. Adanya perintah Kapolres tentang pelaksanaan apel pagi pada jam 06.00 WIB yang di lanjutkan dengan tugas di jalan melaksanakan pengaturan lalu-lintas menurut para anggota di anggap memberatkan dan terlalu berlebihan. Kegiatan ini pada dasarnya Kapolres melaksanakan perintah Kapolda dimana setiap kesatuan tidak harus apel tepat pada jam 07.00 WIB namun yang terpenting adalah kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat pada jam-jam rawan. Disamping itu ada indikasi bahwa menurut Kapolres banyak anggota Polres Kudus yang tidak hadir pada saat apel pagi dan masuknya siang hari dikarenakan ada anggota yang pada malam hari melakukan kegiatan-kegiatan mengawal kayu jati gelap, sehingga yang tidak hadir pada saat apel pagi jam 06.00 WIB, oleh Kapolres langsung dilakukan tindakan disiplin baik berupa tindakan Skumlin atau hukuman phisik. Hal ini anggota

beranggapan bahwa tindakan Kapolres terlalu keras dan tidak sesuai dengan ketentuan penghukuman anggota. Disamping itu ada pula anggota yang beranggapan "pendaringan atau mata pencharian tambahannya hilang" dengan Apel Pagi pada jam 06.00 WIB tersebut.

d. Kebijakannanaan Kapolres memindahkan Pelda DARSONO dari Kaur Bin Ops Sat IPP ke Kaur Bin Ops Sat Sabhara bukan karena Pelda Darsono berbincang-bincang dengan Aspers Kapolfri Mayjen Pol. Drs. Kadaryanto tetapi dalam rangka meningkatkan kinerja Polres Kudus. Begitu pula hal yang sama Kapolres memindahkan Peltu PASIMIN (Kaur Bin Ops Sat Serse) ke Paur Bin Ops Puskodalops dalam rangka meningkatkan kinerja Polres Kudus karena yang bersangkutan sudah terlalu lama menduduki jabatan tersebut.

e. Adanya anggota Sat Sabhara Polres Kudus yang melaksanakan dinas penjagaan di rumah kediaman Kapolres mulai jam 20.00 WIB s/d 06.00 WIB dan beranggapan bahwa jaga di kediaman Kapolres adalah "Menjaga Rusa" karena Kapolres memelihara "Rusa" adalah sesuatu hal yang dicari-cari. Pada dasarnya bahwa

setiap anggota Sabhara tersebut tidak mengerti dan menghayati, tidak mempunyai kesadaran apa artinya melaksanakan tugas penjagaan, mengikuti rumah kediaman Kapolres jauh dari Mako Polres. Adalah sesuatu yang wajar dan suatu kehormatan bagi setiap anggota untuk mengamankan pimpinan termasuk mengamankan kediaman Kapolres dari gangguan kejahatan atau gangguan lainnya dan bukan beranggapan jaga di rumah Kapolres untuk menjaga Rusa.

f. Selama menjabat Kapolres selama lebih kurang 2 setengah bulan Kapolres telah menjatuhkan hukuman kepada 20 (dua puluh) orang anggotanya yang telah melanggar disiplin, misalnya tidak hadir apel pagi, tidak berada di TPS saat pencoblosan, Kapolsek tidak mengambil apel anggota pada jam 06.00 WIB atau tidak hadir dinas, anggota tidak memakai pakaian uniform saat bertugas di Kantor. Hal tersebut membuat anggota tidak senang karena

---

**Disamping itu ada pula anggota yang beranggapan "pendaringan atau mata pencharian tambahannya hilang" dengan Apel Pagi pada jam 06.00 WIB tersebut.**

---

langsung dilakukan tindakan phisik, sangsi administrasi atau sangsi phisik dan administrasi. Seharusnya dalam menjatuhkan hukuman Kapolres melalui pentahapan-pentahapan misalnya teguran keras, peringatan dan seterusnya serta melalui prosedur yang berlaku sehingga konflik antara pimpinan dan anggota dapat dihindari.

g. Kebiasaan hidup enak dari para anggota dimana semula yang melakukan pengawalan barang-barang hasil cetakan (Jarum Kudus, Pura dll) hanya dikawal oleh anggota UPS dan mendapatkan honor cukup besar namun ada kebijaksanaan Kapolres bahwa pengawalan dilaksanakan oleh semua Staf Polres dalam rangka pemerataan. Hal tersebut tidak dikehendaki oleh anggota UPS dan merasa rejekinya diganggu sehingga dapat menjadi salah satu sumber konflik:

h. Polres Kudus didominasi oleh SETUKPA (SECAPA) mulai dari Jabatan Wakapolres, Kasat, Kaur, Kapuskodalops, Kabag Kapolsek kecuali Kapolres dan Kasat Lantas dan Paur Reg Ident yang dijabat oleh Perwira lulusan Akpol. Disini ternyata terjadi Klik/Group diantra para alumni SETUKPA dalam

rangka perebutan jabatan Wakapolres dimana Wakapolres dijabat oleh SETUKPA (SECAPA) Angkatan XI tetapi telah melewati jenjang pendidikan SELAPA sedangkan Kapuskodal dijabat oleh SETUKPA/SECAPA Angkatan IX tetapi tidak memiliki pendidikan SELAPA sehingga diduga telah terjadi Klik/Grup (Waka, Kasat IPP, Kasat Serse) yang di Back-Up Kapolres dengan Klik/Grup Kapuskodal (Ka Primkoppol Group) dan Kasat Sabhara. Konflik makin memuncak setelah Wakapolres dipindahkan ke Kabag Jianma Dit Lantas Polda Jateng dan digantikan oleh Kabag Reserse Polwil PATI dari Alumni Akpol/PTIK, sedangkan di Polres Kudus ada Pamen berpangkat Mayor (Mayor Pol DJIMIN) yang menjabat sebagai Ka. Primkoppol dan mempunyai ambisi menjabat Wakapolres.

i. Gejala akan terjadinya aksi unjuk rasa oleh anggota sudah termonitor oleh Kasat IPP Polres Kudus hal tersebut di khawatirkan dilaporkan kepada Kapolres sehingga kurang ada tanggapan dari Kapolres. Seharusnya Kapolres selaku pimpinan selalu tanggap kepada setiap gejala dikesatuannya dan dapat mengambil langkah-langkah tindakan untuk men-

cegah jangan sampai terjadi unjuk rasa anggota. Disini kepemimpinan seorang Kapolres diuji didalam mengatasi setiap keadaan yang akan, sedang dan telah terjadi sehingga situasi intern Polres Kudus dapat diatasi.

#### **7. Penafsiran dan anggapan anggota tentang Reformasi :**

a. Kejadian unjuk rasa anggota Polres Kudus dihalaman Mapolres Kudus pada saat setelah dilaksanakan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke 53 tanggal 1 Juli 1999 jam 09.00 WIB diikuti lebih kurang 195 orang dan dimotori oleh Kasat Sabhara Letda Pol. YULIADI dan didukung oleh anggota UPS. Hal tersebut terlihat bahwa pada saat beberapa anggota yang berdiri akan mengikuti Tasyakuran telah diteriaki "Huuuu" oleh anggota UPS Sabhara sehingga mereka tidak jadi mengikuti Tasyakuran Hari Bayangkara tetapi tetap duduk-duduk dihalaman Mapolres.

Adapun tuntutan anggota yang melaksanakan unjuk rasa antara lain :

- 1) Skumlin Anggota dicabut.
- 2) Apel pagi seperti biasa.
- 3) Jaga Rusa/kijang dihilangkan.
- 4) UKP hak anggota harus ditanda tangani.

5) Usulan Koprak ke Sersan harus ditandatangani.

6) Jangan sering menghukum anggota.

7) Kapolres harus minta maaf kepada anggota.

b. Pelaksanaan unjuk rasa diungkapkan dalam orasi yang diikuti oleh 1 orang Pamen, 1 orang PA, dan 143 anggota (Ba dan Ta) dan disaksikan oleh masyarakat yang melintas jalan depan Mapolres dan para wartawan dalam bentuk kegiatan antara lain :

1) Peragaan serah terima jabatan Kapolres Kudus dari pejabat lama ke pejabat baru.

2) Peragaan anggota yang terkena tindakan disiplin dari Kapolres yang berpura-pura diambil tindakan Kapolres hingga pingsan, sehingga seolah-olah tindakan Kapolres kepada anggotanya sudah tidak manusiawi.

3) Peragaan selamatan agar Kapolres segera dipindahkan yang diungkapkan dalam sebuah do'a yang dilaksanakan oleh Serda DJIMIN S. dan diikuti oleh 18 anggota lainnya.

4) Ungkapan-ungkapan vokal dari anggota Sat Sabhara sebanyak 20 (dua puluh) orang sehingga mendorong terjadinya unjuk rasa. Mengapa anggota Sat Sabhara begitu vokal kepada Kapolres

resnya diduga karena adanya pengaruh dari Kasat yaitu Letda Pol YULIADI. Sebelum menjabat Kasat Sabhara Polres Kudus yang bersangkutan lebih banyak bertugas dibidang Keuangan Polwil Pati. Dengan latar belakang di bidang keuangan maka ia (Kasat Sabhara) lebih mengetahui seluk beluk keuangan dan diduga setiap penugasan mengharapkan imbalan materi misalnya uang makan dan sebagainya. Tanpa ada pengaruh dari Kasatnya, tidak mungkin anak buahnya (anggotanya) begitu berani mengungkapkan hal-hal yang vokal kepada Kapolresnya.

5) Ada anggota Ba dan Ta yang hanya pasif yang tidak melaksanakan orasi unjuk rasa (lebih kurang 82 orang) karena bilamana meninggalkan lapangan diteriaki "Huuuu" oleh anggota UPS dan dianggap tidak punya Solidaritas. Sedangkan 15 orang anggota Sat IPP memang telah mendapatkan tugas dari Kasat IPP untuk memonitor dan mengumpulkan informasi tentang kegiatan unjuk rasa tersebut.

6) Adanya anggota-anggota Polres Kudus yang patut diduga sebagai provokator, pendukung dan pendorong

terjadinya unjuk rasa antara lain :

a) Mayor Pol. G. DJIMIN (Ka. Primkoppol) dengan indikasi pada saat keluar dari ruangan aula meninggalkan Polres (mewakili Kapolres menghadiri sidang DPRD) yang bersangkutan mengacungkan ibu jari dan tangannya terangkat keatas sambil melangkah 2 - 3 langkah. Yang bersangkutan di duga kuat telah mendorong anggota untuk unjuk rasa karena ambisinya untuk menjadi Wakapolres tidak tercapai dan hanya menjadi Ka. Primkoppol walaupun pangkatnya naik menjadi Mayor Polisi. Sedangkan jabatan rangkapnya selaku Kapuskodolops Polres Kudus telah digantikan oleh orang lain sehingga menganggap sumber rejekinya menjadi berkurang.

b) Letda Pol. YULIADI (Kasat Sabhara) dan Kopka WAWAN SETIAJI (pernah mendapat hukuman sel Kapolres) bersama-sama saudara JAYADI (Pengusaha Penggergajian kayu) setelah keluar dari Mapolres membeli minum Aqua dan Snack untuk anggota yang unjuk rasa. Letda Pol. YULIADI diduga telah

---

**Mayor Pol. G. DJIMIN**  
pernah menemui Kasat IPP dan  
mengatakan  
"inilah reformasi, jadi unjuk rasa  
boleh-boleh saja  
dan tidak dilarang".

---

melindungi para pengusaha-pengusaha kayu gelap dan oleh Kapolres telah dilakukan pengketatan dengan melaksanakan Apel Pagi pada pukul 06.00 sehingga anggota yang pada malam hari mengawal kayu gelap (sesuai indikasi Kapolres) tidak dapat mengikuti Apel pagi pada jam 06.00 WIB dan akan beresiko mendapat Skumlin dari Kapolres. Apel pagi jam 06.00 salah satu tuntutan anggota Sabhara untuk dikembalikan seperti semula (apel pagi pada jam 07.00).

c)3 (tiga) orang Ba. tinggi yang dipindahkan jabatan oleh Kapolres yaitu :

- 1)Peltu PASIMIN dari Kaur Bin Ops Reserse ke jabatan baru Set Ops Puskodal Ops.
- 2)Peltu SUKARDJO dari Bintara Sandi ke jabatan baru di Puskodalops.
- 3)Pelda DARSONO Kaur Bin Ops Sat IPP ke ja-

batan baru selaku Kaur Bin Ops Sat Sabhara.

Ketiga Bintara tinggi tersebut berada dilapangan dan bergabung dengan anggota yang melakukan unjuk rasa dan nampak aktif berbicara dengan para wartawan. Diduga ketiga Bintara tinggi tersebut telah sakit hati dan tidak senang dengan Kapolres yang telah memindahkan jabatan dari jabatan yang enak (basah) kepada jabatan yang tidak enak (kering).

c. Penafsiran yang salah tentang arti Reformasi oleh anggota Polri antara lain :

1)Di Era Reformasi karena Polri telah keluar dari ABRI dan berada dibawah Dephankam maka mereka menganggap telah menjadi orang sipil dan bisa melaksanakan unjuk rasa bilamana ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Mereka lupa bahwa sebagai anggota Polri tetap terikat kepada KUHPT dan KUHDH yang hingga kini belum dicabut.

2)Adanya fakta bahwa Mayor Pol. G. DJIMIN pernah menemui Kasat IPP dan mengatakan "inilah reformasi, jadi unjuk rasa boleh-boleh

saja dan tidak dilarang".

Seharusnya sebagai seorang Pamen Polisi bilamana mengetahui ada anak buahnya (Pa, Ba, Ta) akan mengadakan unjuk rasa wajib mencegah dan memberitahukan dan melarang jangan sampai terjadi unjuk rasa karena kita mempunyai pedoman hidup Tri Brata dan pedoman kerja Catur Prasetya.

3) Disiplin anggota Polres Kudus dalam kaitannya dengan reformasi.

Dengan adanya reformasi ada diantara anggota Polres Kudus yang menafsirkan salah dan dapat berbuat menurut kehendak dan kemauannya tanpa mengabaikan etika, moral, disiplin, tata krama, sopan santun dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dan tercermin dari cara mereka melakukan orasi unjuk rasa yang tanpa mengabaikan budaya ketimuran dan sangat merendahkan martabat dan kewibawaan pimpinannya (Kapolda). Sehingga bilamana dalam satu kesatuan dimana anggotanya seperti anggota-anggota Polres Kudus tersebut, bilamana rusaknya kesatuan tersebut. Apalagi berdasarkan data yang ada para pelaku unjuk rasa

sebagian besar adalah Polisi-polisi muda berpangkat Bintara dan baru 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun bertugas sebagai Polisi disamping ada Polisi lama namun pada umumnya berpangkat Tamtama.

#### 8. Mutasi anggota yang terlibat Unjuk Rasa :

Kebijakan Kapolda setelah melakukan kajian unjuk rasa di Polres Kudus, mengambil tindakan pencegahan agar "Kasus Kudus" tidak menjadi preseden buruk di jajaran Satwilya berupa mutasi dan penugasan ke daerah operasi dengan Ketentuan :

1) Penugasan ke daerah Operasi Aceh dan Timor Timur dengan Rincian :

- a) Ke daerah Aceh sebanyak 27 orang.
- b) Ke daerah Timor Timur sebanyak 1 orang.

2) Mutasi keluar Polres dalam jajaran Polda Jateng 112 orang.

3) Mutasi anggota ditetapkan melalui 2 (dua) TR masing-masing No. Pol. : TR/818/1999 tanggal 20 Juli 1999 dan TR/843/1999, tanggal 26 Juli 1999.

4) Guna mengisi pengurangan Personil Polres Kudus sebanyak 150 orang, telah ditugaskan Bintara remaja sebanyak 9 dan penggantian beberapa Pejabat termasuk Wakapolres.

9. Anggota yang diduga sebagai pendukung aksi unjuk rasa adalah :

1) Mayor Pol. G. DJASMIN (Kasat Primkopol) dengan indikasi, saat keluar dari ruangan Aula akan meninggalkan Mapolres (mewakili Kapolres menghadiri sidang DPRD), dengan mengangkat tangan dan mengacungkan ibu jari tangan kanan sampai 2 atau 3 langkah.

2) Letda Pol. YULIADI (Kasat Sabhara) dan Kopka Wawan Setiaji bersama pengusaha penggergajian kayu saudara Jayadi keluar Mapolres membelikan minuman Aqua dan Snack untuk anggota yang unjuk rasa.

3) 3 (tiga) orang Bintara Tinggi masing-masing Peltu Pasimin Nrp. 52030079 Set Ops Puskodalops (mantan Kaur Bin Ops

Serse), Peltu SUKARDJO (Ba Sandi) dan Pelda Darsono Kaur Bin Ops Serse (mantan Kaur Bin Ops IPP) yang berada di lapangan dan masuk kelompok anggota yang mengadakan unjuk rasa dan terlibat aktif berbicara dengan para wartawan.

#### IV. PENUTUP.

##### 10. Kesimpulan :

a. Unjuk rasa anggota Polres Kudus dengan segalauntutannya telah terjadi karena adanya pengaruh, dorongan dan provokasi dari Pamen dan Pama serta Ba Tinggi anggota Polres Kudus yaitu Mayor Pol. G. DJIMIN, Letda Pol. YULIADI, Peltu PASIMIN, Peltu SUKARDJO dan Pelda DARSONO yang tidak senang dengan kebijaksanaan Kapolresnya dalam rangka meningkatkan kinerja Polres Kudus, yang selanjutnya memanfaatkan dan mempengaruhi anggota Bintara dan Tamtama untuk melakukan unjuk rasa dalam rangka reformasi.

b. Unjuk rasa anggota Polres Kudus menggambarkan bagaimana rendahnya kinerja, profesionalisme dan disiplin anggota sehingga sudah mengabaikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi Polri, rasa sopan santun dan saling menghormati antara atasan dan bawahan serta sudah mengabaikan pedoman hidup "TRI BRATA" dan pedoman kerja "CATUR PRASETYA".

---

**Unjuk rasa anggota Polres Kudus menggambarkan bagaimana rendahnya kinerja, profesionalisme dan disiplin anggota sehingga sudah mengabaikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi Polri, rasa sopan santun dan saling menghormati antara atasan dan bawahan serta sudah mengabaikan pedoman hidup "TRI BRATA" dan pedoman kerja "CATUR PRASETYA".**

---

mati antara atasan dan bawahan serta sudah mengabaikan pedoman hidup "TRI BRATA" dan pedoman kerja "CATUR PRASETYA".

c. Tuntutan tugas pengaman tidak diberi makan dan tugas jada di kediaman Kapolres untuk menjaga Rusa adalah alasan yang dibuat-buat dan dicari-cari dan menggambarkan jiwa dan rasa kejuangan yang rendah dari anggota Polres Kudus dan menggambarkan kinerja kesatuan yang rendah.

d. Keberatan anggota atas penjatuhan hukuman disiplin oleh Kapolres seharusnya disalurkan melalui ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku misalnya hak mengajukan keberatan dan bukan disalurkan melalui unjuk rasa.

e. Kebiasaan hidup enak dan bebas dibawah kepemimpinan Kapolres sebelumnya mengingat wilayah Kudus kehidupan masyarakatnya relatif lebih baik bilamana dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain di Polwin Pati sehingga dengan adanya pergantian pimpinan yang ingin meningkatkan "Kinerja, Disiplin, Kesiapan Kesatuan" apalagi dalam rangka menghadapi Pemilu dan Sidang Umum MPR, anggota merasa

tertekan yang tidak bebas dan diungkapkan dalam tuntutan-tuntutan dalam unjuk rasa dan orasi.

f. Mutasi anggota disamping sebagai upaya menghilangkan konsentrasi para anggota Polri pengunjuk rasa juga sebagai tindakan konsekwensi Indisipliner yang mempunyai dampak jera cukup tinggi.

## 11. Saran-Saran :

a. Unjuk rasa termasuk pelanggaran disiplin anggota dan mengingat diantara para pengunjuk rasa sudah meng-kristal maka perlu tindakan administratif berupa mutasi dari Polres Kudus ke Satuan lain.

b. Kapolres selaku pimpinan agar selalu mengadakan tatap muka sehingga mengetahui apa yang menjadi keluhan anggota.

c. Perlu memberikan Santi Aji dan Santi karma secara berkala kepada seluruh anggota dengan pengawasan dan pengendalian yang cukup ketat.

d. Perlu peningkatan disiplin kepada anggota dengan pengetatan apel pagi/siang, keberadaan anggota diruang kerja dan tempat lain dimana mereka bertugas. ■